

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGATURAN  
TANAMAN KRATOM DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
KESEHATAN DI INDONESIA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**ADITYA CANDRA KRISTIAN ZEBUA**

**1910113045**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H  
Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**No.Reg : 8/PK-IV/VI/2024**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGATURAN  
TANAMAN KRATOM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI  
INDONESIA**

**ABSTRAK**

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat mempengaruhi pula perkembangan jenis-jenis narkotika dan psikotropika bertambah banyak, jenis-jenisnya pun yang beredar di kalangan pecandu semakin bervariasi. Zat tersebut dikenal dengan nama *New psychoactive Substance*. Dikarenakan zat tersebut belum masuk dalam lampiran daftar narkotika Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka penegak hukum sulit untuk menjeratnya. Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap jenis tanaman daun kratom yang belum diatur dalam lampiran narkotika golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 dan mengetahui bagaimana peran hukum Kesehatan dalam pengaturan tanaman kratom. Tanaman kratom (*Mitragyna speciosa*) telah menjadi perdebatan penting dalam konteks hukum dan kesehatan di Indonesia. Kebijakan hukum pidana yang mengatur penggunaan, penanaman, dan perdagangan tanaman ini berdampak pada kesehatan masyarakat dan menghadirkan berbagai tantangan yang memerlukan pemahaman mendalam. Penelitian ini melakukan tinjauan terhadap kebijakan hukum pidana terkait tanaman kratom dan melihatnya dari perspektif hukum kesehatan. Latar belakang masalah mencakup pertumbuhan popularitas penggunaan kratom, manfaat potensial, risiko kesehatan yang terkait, dan ketidakpastian hukum. Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan peran hukum kesehatan dalam pengaturan tanaman kratom, termasuk pengawasan kesehatan masyarakat, regulasi produk, dan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan menggabungkan perspektif hukum pidana dan hukum kesehatan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebijakan hukum mengenai tanaman kratom dalam konteks hukum kesehatan di Indonesia. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali implikasi hukum dan kesehatan yang lebih mendalam serta untuk memahami dampak perubahan regulasi terhadap penggunaan dan perdagangan tanaman kratom.

**Kata Kunci :Kebijakan Hukum Pidana, Narkotika, Hukum Kesehatan, Tanaman Kratom**